

Jaringan Kebijakan Dalam Implementasi *Mobile SIMPEG* Untuk Meningkatkan Disiplin PNS: Studi Pada IPDN Kampus NTB

I Gusti Ayu Putu Aryanti*, Rulinawaty, Milwan
Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
*yutu_mtr@yahoo.com

Abstract

The development of information technology has encouraged innovation in managing civil servant discipline, including through the implementation of the Mobile Personnel Management Information System (Mobile SIMPEG) within the Ministry of Home Affairs. This application is designed to enhance objectivity and accuracy in monitoring employee attendance. However, in practice, several challenges persist, such as the exploitation of system loopholes by some employees, limited direct supervision, and suboptimal coordination among actors within the policy network. This study aims to analyze the effectiveness of the policy network in the implementation of Mobile SIMPEG at the Secretariat of IPDN Nusa Tenggara Barat Campus. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving 15 informants consisting of leaders, operators, and administrative staff. The analysis focuses on key dimensions of the policy network, including actors, functions, structure, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. The findings indicate that the policy network has been established and is functioning; however, its effectiveness remains moderately effective, yet not optimal. The network structure tends to be hierarchical, with a high dependence on central actors, while coordination among actors is still limited and often informal. In addition, the absence of detailed standard operating procedures (SOPs) at the local level results in variations in policy implementation. From an implementation perspective, communication is not consistently structured, resources face limitations in digital competence and infrastructure, and implementers' attitudes vary across units. Therefore, strengthening formal coordination, developing internal SOPs, and enhancing human resource capacity are essential to support a more consistent, integrated, and sustainable implementation of Mobile SIMPEG in improving civil servant discipline.

Keywords: *Policy Network; Mobile SIMPEG; Policy Implementation; Civil Servant Discipline; Digital Governance; Public Administration*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi dalam pengelolaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi *Mobile Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan akurasi pengawasan kehadiran pegawai. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti pemanfaatan celah sistem oleh sebagian pegawai, keterbatasan pengawasan langsung, serta belum optimalnya koordinasi antaraktor dalam jaringan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jaringan kebijakan dalam implementasi *Mobile SIMPEG* di Sekretariat IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri dari unsur pimpinan, operator, dan staf pelaksana. Analisis difokuskan pada tujuh dimensi jaringan kebijakan, yaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kebijakan telah terbentuk dan berjalan, namun efektivitasnya masih cukup efektif namun belum optimal. Struktur jaringan cenderung hierarkis dengan ketergantungan tinggi pada aktor pusat, sementara koordinasi antaraktor masih terbatas dan sering bersifat informal. Selain itu, belum tersedianya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) teknis di tingkat kampus menyebabkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan. Dari sisi implementasi, komunikasi belum konsisten, sumber daya menghadapi keterbatasan pada kompetensi digital dan infrastruktur, serta disposisi pelaksana belum merata. Dengan demikian, penguatan koordinasi formal, penyusunan SOP internal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk mendorong implementasi *Mobile SIMPEG* yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan disiplin PNS.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan; *Mobile SIMPEG*; Implementasi Kebijakan; Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Tata Kelola Digital; Administrasi Publik

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di era digital menuntut pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara. Salah satu permasalahan klasik yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai inovasi berbasis digital, salah satunya melalui penerapan aplikasi *Mobile Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian* (SIMPEG) sebagai instrumen pengawasan kehadiran yang bersifat objektif, transparan, dan *real-time*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem absensi berbasis digital mampu meningkatkan disiplin pegawai. Studi oleh Ardiyanto et al., (2022); serta Pratama et al., (2023) menemukan bahwa absensi *online* berkontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan melalui pencatatan kehadiran yang lebih akurat dan terkontrol. Demikian pula, Hudri et al., (2024) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penggunaan aplikasi absensi berbasis android dengan disiplin kerja pegawai. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis dan output administratif, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan di balik penggunaan teknologi tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan temuan Arieska (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi absensi berbasis *online* mampu meningkatkan disiplin kerja aparatur sipil negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan prosedur operasional, konsistensi pengawasan, serta tingkat pemahaman pengguna terhadap sistem. Tanpa dukungan mekanisme implementasi yang terstruktur, penggunaan teknologi absensi digital berpotensi hanya menghasilkan kepatuhan administratif tanpa diikuti perubahan perilaku disiplin secara substantif.

Dalam praktiknya, penggunaan *Mobile SIMPEG* tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Ditemukan adanya kesenjangan antara data kehadiran digital dengan kondisi kehadiran faktual di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi, tetapi juga oleh perilaku aktor, mekanisme pengawasan, serta pola interaksi antar pihak

yang terlibat. Selain itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya koordinasi menjadi faktor yang memengaruhi implementasi absensi digital (Annisa & Frinaldi, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu keterbatasan kajian yang hanya menilai efektivitas teknologi absensi dari sisi hasil, tanpa menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung dalam konteks interaksi antaraktor. Padahal, implementasi kebijakan publik, khususnya yang berbasis teknologi, merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, sumber daya, dan peran yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif jaringan kebijakan untuk menganalisis implementasi *Mobile SIMPEG*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana relasi antaraktor, distribusi kewenangan, serta pola koordinasi memengaruhi efektivitas kebijakan. Sejalan dengan pandangan Abdullah (2016) pergeseran dari *government* menuju *governance* menempatkan interaksi dan kolaborasi antaraktor sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan publik. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas jaringan kebijakan dalam implementasi *Mobile SIMPEG* dalam meningkatkan disiplin PNS.

Secara khusus, penelitian ini mengkaji: (1) aktor dan struktur jaringan kebijakan; (2) fungsi, pelembagaan, dan aturan bertindak; (3) hubungan kekuasaan dan strategi aktor; serta (4) kontribusi jaringan kebijakan terhadap peningkatan disiplin pegawai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian jaringan kebijakan pada konteks digitalisasi birokrasi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan berbasis teknologi di sektor publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis dinamika jaringan kebijakan dalam implementasi *Mobile SIMPEG* di Sekretariat IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam interaksi antaraktor, distribusi peran, serta konteks implementasi kebijakan berbasis teknologi dalam lingkungan birokrasi yang kompleks. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam (Arikunto, 2012). Penelitian dilaksanakan di Sekretariat IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat selama ± 3 bulan (September-November 2025). Lokasi dipilih secara *purposif* karena merupakan unit kerja yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan *Mobile SIMPEG* di bawah Kementerian Dalam Negeri. Informan penelitian berjumlah 15 orang yang ditentukan melalui teknik *purposive* sampling, berdasarkan kriteria keterlibatan langsung, posisi strategis, dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan. Informan terdiri dari: (1) unsur pusat (Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri), (2) pimpinan kampus (Direktur), (3) pejabat administrasi (Kepala Bagian/Subbag terkait), (4) operator teknis *Mobile SIMPEG*, dan (5) pegawai sebagai pengguna akhir. Komposisi ini bertujuan untuk merepresentasikan jaringan kebijakan secara multi-level. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali persepsi, strategi, dan pengalaman aktor dalam implementasi kebijakan. Kedua, observasi non-partisipan yang dilakukan di lingkungan kerja untuk melihat praktik penggunaan *Mobile SIMPEG*, termasuk proses absensi, penanganan kendala teknis, dan interaksi antaraktor. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, surat edaran terkait *SIMPEG*, data rekapitulasi absensi pegawai, serta dokumen struktur organisasi dan pedoman teknis yang tersedia. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan secara berulang

melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, pengkodean, dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema penelitian (aktor, fungsi, struktur, dan lainnya). Kedua, penyajian data dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antaraktor dan faktor implementasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan antar sumber data (triangulasi) guna memastikan konsistensi dan validitas temuan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai efektivitas jaringan kebijakan dalam implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat.

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Jaringan Kebijakan Dalam Implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus NTB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus NTB telah membentuk suatu jaringan kebijakan yang melibatkan aktor multi-level dengan peran yang terdiferensiasi. Aktor pusat, yaitu Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, berfungsi sebagai perumus kebijakan sekaligus pengendali sistem, sementara aktor lokal meliputi pimpinan kampus, unit kepegawaian, operator teknis, dan pegawai sebagai pengguna. Konfigurasi ini mencerminkan struktur jaringan yang bersifat hierarkis-terintegrasi, di mana relasi vertikal tetap dominan, namun diikuti oleh interaksi horizontal dalam praktik implementasi sehari-hari.

Dalam perspektif teori jaringan kebijakan, struktur tersebut menunjukkan bahwa jaringan tidak sepenuhnya berbasis kolaborasi horizontal, melainkan masih berada dalam orbit birokrasi hierarkis dengan pusat sebagai simpul utama (*central node*). Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya mekanisme adaptif di tingkat lokal, seperti komunikasi informal dan koordinasi lintas unit, yang memungkinkan kebijakan tetap berjalan dalam situasi keterbatasan. Hal ini menegaskan bahwa jaringan kebijakan yang terbentuk bersifat *hybrid*, menggabungkan karakter hierarki dengan praktik jaringan yang lebih fleksibel.

Dari sisi fungsi, jaringan kebijakan telah berjalan dalam mendukung implementasi *Mobile SIMPEG*, terutama dalam hal distribusi peran dan pelaksanaan tugas. Namun, fungsi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara kolaboratif. Interaksi antaraktor masih didominasi oleh pola instruksional dan koordinasi yang bersifat *ad-hoc*, sehingga belum menghasilkan mekanisme kerja bersama yang stabil. Dalam teori jaringan kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi jaringan belum berkembang menjadi *collaborative governance*, melainkan masih berada pada tahap koordinasi fungsional yang terbatas.

Pada dimensi aturan bertindak (*rules of conduct*), penelitian menemukan bahwa regulasi formal telah tersedia sebagai landasan normatif, tetapi belum diikuti oleh operasionalisasi yang memadai di tingkat lokal. Ketiadaan SOP internal menyebabkan variasi interpretasi dalam pelaksanaan, serta memperkuat penggunaan mekanisme informal dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka teori, kondisi ini menunjukkan bahwa aturan belum berfungsi sebagai instrumen yang mengikat dan menstandarkan perilaku aktor secara konsisten, sehingga mengurangi tingkat akuntabilitas jaringan kebijakan. Selanjutnya, dimensi relasi kekuasaan (*power relations*) memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi kewenangan antara aktor pusat dan lokal.

Aktor pusat memiliki kontrol dominan terhadap sistem dan keputusan teknis, sementara aktor lokal lebih berperan sebagai pelaksana dengan ruang diskresi terbatas. Dalam perspektif jaringan kebijakan, kondisi ini mencerminkan adanya *power asymmetry* yang berdampak pada tingginya ketergantungan aktor lokal terhadap pusat. Implikasinya,

fleksibilitas dan responsivitas jaringan menjadi terbatas, terutama dalam menangani permasalahan teknis secara cepat dan kontekstual. Sementara itu, strategi aktor (*actor strategies*) yang berkembang dalam jaringan kebijakan menunjukkan pola yang adaptif namun belum terlembagakan.

Aktor pusat mengandalkan pendekatan regulatif dan teknis, sedangkan aktor lokal mengembangkan strategi berbasis pengalaman lapangan, seperti pendampingan informal dan solusi *ad-hoc* terhadap kendala sistem. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi yang dijalankan belum terkoordinasi secara sistematis antaraktor, sehingga lebih bersifat reaktif daripada strategis. Dalam konteks teori jaringan kebijakan, kondisi ini menunjukkan belum terbentuknya *shared strategy* yang menjadi prasyarat efektivitas jaringan.

Secara keseluruhan, hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan ini didasarkan pada prinsip saling ketergantungan (*resource interdependence*), terutama dalam pertukaran sumber daya berupa regulasi, teknologi, dan informasi. Namun, ketergantungan tersebut bersifat tidak seimbang, dengan dominasi aktor pusat yang lebih kuat. Kondisi ini memperkuat karakter jaringan yang cenderung birokratis-hierarkis, meskipun dalam praktiknya terdapat dinamika adaptif yang memungkinkan kebijakan tetap berjalan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa jaringan kebijakan dalam implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus NTB telah terbentuk dan berjalan, namun efektivitasnya masih berada pada tingkat cukup efektif namun belum optimal. Kondisi ini tercermin dari fungsi jaringan yang belum sepenuhnya kolaboratif, aturan bertindak yang belum teroperasionalisasi secara konsisten, relasi kekuasaan yang masih timpang, serta strategi aktor yang bersifat adaptif namun belum terkoordinasi secara kelembagaan. Temuan empiris tersebut tidak hanya menjelaskan dinamika implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan implikasi teoretis terhadap pengembangan perspektif jaringan kebijakan, khususnya dalam konteks digitalisasi birokrasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan tidak selalu berkembang menuju pola kolaboratif yang setara, melainkan dapat berbentuk *hybrid governance*, yaitu kombinasi antara kontrol hierarkis yang kuat dari aktor pusat dan praktik adaptif di tingkat lokal. Selain itu, adanya ketergantungan asimetris antaraktor menegaskan bahwa distribusi kewenangan dan kontrol teknologi menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas jaringan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas jaringan kebijakan dalam implementasi kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor dan struktur, tetapi juga oleh kualitas interaksi, keseimbangan relasi kekuasaan, serta tingkat institusionalisasi mekanisme kerja dalam jaringan tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Jaringan Kebijakan Berdasarkan Kerangka *Edward III*

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa keempat faktor dalam kerangka *Edward III* berperan sebagai determinan operasional yang memengaruhi tingkat efektivitas implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus NTB. Secara umum, faktor-faktor tersebut telah tersedia dan berjalan, namun belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Hal ini tercermin dari komunikasi yang masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara sistematis, sumber daya yang tersedia namun belum merata dari sisi kapasitas dan infrastruktur, disposisi pelaksana yang cenderung positif tetapi belum konsisten, serta struktur birokrasi yang telah terbentuk namun belum didukung oleh SOP operasional yang rinci. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa kendala implementasi tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik jaringan kebijakan yang bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya terkoordinasi.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kerangka *Edward III* memiliki relevansi dalam menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan, namun belum cukup untuk menangkap kompleksitas relasi antaraktor, ketergantungan pusat-daerah, serta dinamika strategi adaptif yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, *Edward III* berfungsi sebagai kerangka analisis pendukung yang memperdalam pemahaman mengenai aspek operasional implementasi, sementara teori jaringan kebijakan tetap lebih komprehensif dalam menjelaskan dinamika utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah berkontribusi terhadap berjalannya implementasi *Mobile SIMPEG*, keterbatasan pada masing-masing faktor tersebut menjadi alasan mengapa jaringan kebijakan yang terbentuk baru mencapai tingkat cukup efektif namun belum optimal. Aturan bertindak yang terbentuk dalam jaringan ini mencakup aspek formal dan informal yang secara kolektif membentuk perilaku pegawai. Aturan formal yang ketat, seperti kewajiban absensi berbasis lokasi GPS dan konsekuensi pemotongan tunjangan, menjadi pendorong utama kepatuhan.

Namun, aturan ini diimbangi oleh norma informal, seperti mekanisme pelaporan kendala teknis secara langsung kepada operator tanpa melalui birokrasi berjenjang. Kombinasi antara aturan formal yang mengikat dan fleksibilitas informal ini terbukti efektif dalam memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan pengguna. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan *Mobile SIMPEG* di Sekretariat IPDN Kampus NTB menunjukkan bahwa jaringan kebijakan telah terbentuk dan berjalan, namun efektivitasnya masih berada pada tingkat cukup efektif namun belum optimal.

Dari perspektif jaringan kebijakan, kondisi ini tercermin pada fungsi antaraktor yang belum sepenuhnya kolaboratif, struktur jaringan yang cenderung hierarkis, aturan bertindak yang belum teroperasionalisasi secara konsisten, relasi kekuasaan yang masih timpang akibat dominasi aktor pusat, serta strategi aktor yang bersifat adaptif namun belum terkoordinasi secara kelembagaan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama implementasi tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi pada pola relasi antaraktor, distribusi kewenangan, serta tingkat integrasi mekanisme kerja dalam jaringan kebijakan itu sendiri.

Sementara itu, analisis berdasarkan kerangka *Edward III* menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan sebagai determinan operasional yang memengaruhi kinerja implementasi di lapangan. Keempat faktor tersebut telah tersedia, namun belum sepenuhnya mendukung implementasi secara optimal, yang ditandai oleh komunikasi yang belum terstruktur, keterbatasan kapasitas dan pemerataan sumber daya, variasi sikap pelaksana dalam adaptasi teknologi, serta struktur birokrasi yang belum didukung oleh SOP operasional yang rinci.

Temuan ini menegaskan bahwa *Edward III* relevan untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi, tetapi belum mampu menjelaskan secara utuh kompleksitas interaksi dan ketergantungan antaraktor dalam jaringan kebijakan. Dengan demikian, sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa teori jaringan kebijakan lebih tepat digunakan sebagai kerangka utama karena mampu menjelaskan dinamika relasional, ketergantungan pusat-daerah, serta strategi adaptif aktor dalam implementasi kebijakan digital. Sementara itu, kerangka *Edward III* berfungsi sebagai

teori pendukung yang memperdalam analisis pada aspek operasional implementasi. Integrasi kedua perspektif ini mengarah pada satu kesimpulan utama bahwa efektivitas implementasi *Mobile SIMPEG* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga oleh kualitas interaksi dalam jaringan, keseimbangan relasi kekuasaan, serta tingkat institusionalisasi mekanisme kerja. Oleh karena itu, meskipun kebijakan telah berjalan, keterbatasan pada kedua aspek tersebut menjadi alasan mengapa implementasi *Mobile SIMPEG* di IPDN Kampus NTB masih berada pada kondisi cukup efektif namun belum optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *Mobile SIMPEG* dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di IPDN Kampus NTB telah berjalan melalui jaringan kebijakan yang terbentuk secara multi-level, namun efektivitasnya masih cukup efektif dan belum optimal. Dari perspektif jaringan kebijakan, kondisi ini ditandai oleh struktur yang cenderung hierarkis, fungsi antaraktor yang belum sepenuhnya kolaboratif, aturan bertindak yang belum teroperasionalisasi secara konsisten, serta relasi kekuasaan yang masih menunjukkan ketergantungan pada aktor pusat. Sementara itu, faktor operasional berdasarkan kerangka *Edward III* menunjukkan bahwa komunikasi yang belum terstruktur, keterbatasan kapasitas dan pemerataan sumber daya, variasi disposisi pelaksana, serta belum optimalnya dukungan struktur birokrasi turut memengaruhi kinerja implementasi. Dengan demikian, peningkatan disiplin pegawai melalui *Mobile SIMPEG* belum sepenuhnya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas interaksi dalam jaringan kebijakan, keseimbangan relasi antaraktor, serta tingkat pelembagaan mekanisme kerja yang mendukung implementasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65-72.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Annisa, N., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Absensi Berbasis Online Melalui Smartphone Untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 75-85.
- Ardiyanto, A., Rahman, A., & Lampasa, Y. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Sekretariat Kota Kendari. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(2), 80-90.
- Arieska, A. (2023). Penerapan Aplikasi E-Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci: Arieska. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 5(7), 688-700.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hudri, S., Yamin, A., & Khadafie, M. (2024). Hybrid and Collaborative Governance Model for Village Development in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 15(2), 209-228.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks In The Public Sector*. London: Routledge.

- Pratama, M. A., Gustini, G., Naidi, P., Permatasari, I., & Pitriani, Y. (2023). Efektifitas Penggunaan Absensi Pusaka Kemenag Terhadap Disiplin Kerja Guru. *An-Nizom: Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 50-60.
- Rhodes, R. A. W. (2006). *20 Policy Network Analysis*. Oxford: Oxford University Press.